

TERTINGGAL

PT Berperan Benahi Daerah Perbatasan

JOGJA--Berbagai daerah di perbatasan perlu segera dibenahi. Sebab hingga saat ini masih ada 5.011 desa tertinggal. Perguruan tinggi (PT) dalam hal ini perlu ikut berperan dalam membenahi persoalan tersebut.

"Dari jumlah tersebut, 1.138 diantaranya berlokasi di daerah perbatasan," ujar Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Ir Gunawan Budiyo MP dalam acara Bincang Sebatik di UMY, kemarin.

Menurut Gunawan, perbaikan sistem dan juga kesejahteraan masyarakat yang berlokasi di daerah perbatasan harus jadi prioritas. Dengan demikian negara Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara tetangga.

Apalagi bagi sebagian negara, daerah perbatasan merupakan sebuah

etalase yang dapat menjaga gengsi antar negara perbatasan. Masing-masing negara itu membenahi daerah perbatasannya dengan sedemikian rupa, agar tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain.

Pembinaan di daerah perbatasan itu biasanya difokuskan pada segi infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat. Tujuannya jelas agar tidak ada intervensi dari negara lain terhadap masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.

"Pemerintah Indonesia seharusnya juga bisa membenahi daerah-daerah perbatasannya, agar tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain, terlebih lagi oleh negara tetangga," jelasnya.

Gunawan mengungkapkan, sesuai dengan Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 terkait dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) merupakan sebuah perencanaan untuk periode lima tahun bagi masing-masing daerah.

Dalam Perpres No 2 tahun 2015 tersebut dijelaskan RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

"Dapat dilihat bahwa semakin terkait dengan lintas kewilayahan tersebut telah diatur dalam Perpres untuk

rencana pembagian dalam jangka menengahnya, namun jika dilihat pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah dipertbatasan yang terbelakang dalam hal ekonomi, dan kesejahteraan," jelasnya.

Gunawan menambahkan, saat ini yang masih menjadi kendala dalam wilayah daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) terdiri dari 3 aspek, yaitu bidang pendidikan, infrastruktur, dan juga kesejahteraan sosial masyarakat.

Dari bidang pendidikan contohnya, jumlah tenaga guru terkadang tidak sebanding dengan jumlah murid yang berlokasi di daerah perbatasan maupun wilayah 3T, jumlah guru yang sedikit tidak dapat mencukupi jumlah murid yang banyak, penyebaran guru ke daerah-daerah perbatasan dan wilayah 3T seharusnya semakin ditingkatkan.

"Faktor pendidikan menjadi hal utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Selain itu infrastruktur jalan juga turut harus diperhatikan karena merupakan sebuah akses untuk pembagian ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu, mahasiswa UMY telah sukses menyelenggarakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan selama kurang lebih dua bulan. Dalam KKN di perbatasan tersebut berbagai program turut dijalankan oleh mahasiswa UMY dalam kegiatan KKN, yaitu Sinergis Pendidikan, Ekonomi Kreatif, dan Penguatan Karakter Pemuda Berbasis Moral dan Intelktual.

Ahmad Ma'ruf SE MSI selaku dosen pembimbing lapangan dan juga pembicara dalam seminar terse-

but mengungkapkan, kegiatan di daerah perbatasan seharusnya dapat membantu pemerintah memfasilitasi masalah sosial yang ada di daerah perbatasan, khususnya Sebatik. Ahmad Ma'ruf mengatakan KKN di perbatasan dapat terus berlanjut ke wilayah-wilayah 3T.

Program KKN di daerah perbatasan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam kepeduliannya terhadap bangsa, berbagai kegiatan KKN yang akan dilaksanakan mahasiswa di daerah perbatasan. "Tentu saja turut dapat pemerintah dalam memfasilitasi sosial masyarakat yang ada di daerah perbatasan," jelasnya.